



IMPLEMENTASI *E-ACCOUNTING* DAN EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS BPKAD KOTA SURABAYA

Frida Fanani Rohma

frida.frohma@trunojoyo.ac.id*

Bintang Agustina

bntgagustin05@gmail.com

Muhammad Gymnastiar

mhmmd.agimm@gmail.com

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi *E-accounting* dan efektivitas pelaporan keuangan saat menerapkan *E-accounting*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Situs penelitian ini merupakan salah satu instansi pemerintah yaitu pada BPKAD Kota Surabaya, karena memiliki karakteristik yang berbeda dari BPKAD lainnya dalam sistem pelaporan keuangan karena menggunakan sistem *E-accounting* yang lebih komprehensif dengan dua basis yaitu basis kas dan akrual, daripada SAPA (Sistem Administrasi Penatausahaan Anggaran) yang hanya menggunakan basis kas. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dengan terlibat pada aktivitas aktor di situs penelitian eksplorasi terfokus, pengumpulan data, dan konfirmasi data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur pada aktor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *software E-accounting* telah sesuai dengan prosedur yang ada dan semua menu diimplementasikan dengan baik. Implementasi *E-accounting* meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan karena menghasilkan laporan keuangan cepat, tepat, dan akurat sesuai standar pelaporan keuangan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: implementasi; efektivitas; *e-accounting*; laporan keuangan pemerintah daerah

Abstract

This study aims to examine how e-accounting implementation and effectiveness of financial reporting when implementing E-accounting. This research uses a qualitative method. This research site is one of the government agencies, namely at BPKAD Surabaya City, because it has different characteristics from other BPKADs in the financial reporting system with e-accounting systems which is more comprehensive with two bases, namely cash and accrual basis, than SAPA (Budget Administration Administration System), which only uses a cash basis. This research uses semi-structured interview techniques. Data collection procedures were carried out by directly observation by engaging in the activities of actors at sites, focused exploration, data collection, and data confirmation conducted by semi-structured interviews with actors. The research findings show that the implementation of E-accounting software is in accordance with existing procedures and all menus are

well implemented. The implementation of e-accounting increases the effectiveness of financial reporting because it produces fast, precise, and accurate financial reports according to standard, laws and regulations.

Keywords: *implementation; effectiveness; e-accounting; local government financial reports*

PENDAHULUAN

Reformasi akuntansi terus berkembang sejak tahun 2000 yaitu penerapan basis *cash toward accrual* tahun 2005 dan penerapan basis akrual yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2015 secara serentak di Indonesia (Rosyidah et al., 2023). Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis *cash toward accrual*. Selanjutnya, dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Indonesia wajib membuat laporan keuangan basis akrual paling lambat 5 (lima) dalam tahun. UU No 17 Tahun 2003 mendorong diterbitkannya PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP. Pemerintah telah menetapkan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kegiatan keseluruhan yang meliputi perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melibatkan aliran data, informasi, penyajian dan penggunaan data yang dilakukan secara elektronik.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat dan akurat (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005). Sistem pengelolaan keuangan yang baik bisa didukung dengan penggunaan teknologi informasi (Rohma, 2023). Teknologi informasi membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan *entry* dari suatu data, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (Setyowati et al., 2016; Rohma & Zakiyah, 2022). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi digunakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pogram-program yang dibangun disegala bidang (Parsaorantua et al., 2017). Adanya digitalisasi teknologi informasi membuat lembaga pemerintah menjadi lebih mudah dalam mengelola keuangan daerah (Rohma et al., 2023).

Teknologi informasi dapat membantu pemerintah lebih efektif dan efisien dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Akhmad et al., (2018) menjelaskan bahwa teknologi informasi yang digunakan dan didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, membuat penyusunan laporan keuangan dapat efektif, efisien, tepat waktu, dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Mamonto et al., (2022) menjelaskan bahwa efektivitas adalah elemen utama untuk mencapai sasaran atau tujuan yang ditentukan di suatu program, organisasi, atau kegiatan. Efektivitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari penerapan prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan dan pencapaian tujuan menyeluruh sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik (Widarsono & Ledian, 2013). Berdasarkan Mamonto et al., (2022) indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas antara lain keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Yuliani & Agustini, 2016). Oleh karena itu, informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus sesuai dengan standar sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pengguna. Slamet & Irmadiani (2022) menjelaskan bahwa LKPD adalah pernyataan entitas pelapor sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan selama satu periode atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan daerah. UU No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa kualitas keuangan pemerintah dapat terwujud jika laporan tersebut memenuhi unsur handal, relevan, dapat dipahami, dan memiliki kemampuan komparabilitas. Pengelolaan keuangan daerah yang diimplementasikan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta efektif dan efisien, mampu menghasilkan laporan yang baik karena didukung dengan ketentuan dan bukti yang kuat (Defitri, 2018). Dengan demikian, diperlukan bagi suatu organisasi atau lembaga untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Rahardja et al., (2018) menjelaskan bahwa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Pemerintah daerah memiliki suatu kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi guna mempermudah proses penyusunan laporan dan data keuangan yang akuntabel. Kewajiban penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memperkuat kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan kepada publik. Atas dasar ini BPKAD Surabaya mengembangkan *software E-Accounting* dengan tujuan mempermudah penyusunan laporan keuangan dan mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintah daerah, khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Situs penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Surabaya, karena memiliki karakteristik yang berbeda dari BPKAD lainnya dalam sistem pelaporan keuangan. Adanya perbedaan organisasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, membuat lembaga dapat mendesain sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. BPKAD Kota Surabaya menggunakan sistem berbasis *website* yang dikenal dengan *E-Accounting* dalam penyusunan laporan keuangannya. *E-Accounting* adalah satu-satunya sistem pelaporan keuangan yang hanya digunakan oleh BPKAD Kota Surabaya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten atau kota lain cenderung menggunakan aplikasi SIPKD, SIPD, dan SIMDA.

Dalam *website* resmi BPKAD Surabaya dijelaskan bahwa aplikasi *E-accounting* adalah sistem aplikasi pelaporan keuangan perangkat daerah dan pemerintah Kota Surabaya. Penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis *online* memudahkan para pihak internal dalam proses pengendalian, memudahkan proses koreksi jika terjadi kesalahan dalam pencatatan serta penyusunan laporan keuangan lebih efektif dan efisien. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan oleh pihak eksternal dapat diakses dengan mudah di Situs resmi pemerintah kota surabaya. BPKAD Kota Surabaya bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan tahunan yang disusun dari laporan keuangan 60 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah kota Surabaya. Dengan mengimplementasikan *software E-accounting* dinilai sangat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan BPKAD yang efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi implementasi dan efektivitas *software E-accounting* dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dengan e-accounting mendorong efektivitas dan transparansi laporan keuangan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap BPKAD Kota Surabaya dalam periode yang akan datang dalam penggunaan aplikasi keuangan. Selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi atau aplikasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

TELAAH TEORI

Teknologi infomasi

Teknologi informasi membantu proses pengolahan data, termasuk proses pengolahan, penyusunan dan penyimpanan data sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang cepat, tepat, akurat dan relevan untuk berbagai pihak yang berkepentingan (Setyowati et al., 2016). Akhmad et al., (2018) menjelaskan bahwa teknologi informasi meliputi teknologi komputer yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola,

menyimpan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan sistem atau alat yang diaplikasikan manusia untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan (Parsaorantua et al, 2017). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi berperan dalam mengelola dan menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam organisasi bisnis tetapi juga dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memperkuat kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan kepada publik. Teknologi informasi dapat membantu dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Silfiani & Pornomowati, 2021).

Penggunaan teknologi informasi akan membantu mempercepat proses pengelolaan dan penyajian data transaksi laporan keuangan, serta meminimalisir adanya kesalahan *entry* jurnal, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Setyowati et al., 2016). Perkembangan teknologi yang pesat, dapat membuat berbagai pihak dapat mengelola, mengakses, dan mengefektifkan informasi keuangan secara cepat dan akurat (Rohma, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat.

Efektivitas

Efektifitas adalah ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan (Wati & Adiputra, 2021). Suatu hal dikatakan efektif jika memenuhi target yang diinginkan atau tujuan yang ditetapkan. Muharsono & Asyifah (2021) menjelaskan bahwa efektifitas adalah tingkat keberhasilan yang didapatkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Efektivitas menggambarkan perihal kemampuan kerja organisasi untuk memberikan nilai guna yang diharapkan dan untuk memenuhi pencapaian atau target yang telah ditentukan sebelumnya (Sukmana, 2021). Efektivitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu individu atau organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mencapai hasil yang baik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas menurut Campbell dalam (Mamonto et al., 2022) yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, input dan output, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh. Keberhasilan program dapat dilakukan dengan melaksanakan program yang sesuai dengan ketetapan sebelumnya. Keberhasilan program dapat dilihat dari mekanisme kegiatan dan proses yang dilakukan di suatu bidang. Keberhasilan sasaran ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan fokus memperhatikan aspek output. Keberhasilan sasaran dapat diukur dengan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan seberapa jauh tingkat output dalam ketetapan sebelumnya.

Kepuasan terhadap program mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Semakin berkualitas suatu produk dan jasa maka tingkat kepuasan pengguna lebih tinggi sehingga menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator input dan output dapat dikatakan efisien jika output lebih besar dari input, dan dikatakan tidak efisien jika input lebih besar dari output. Jika efisiensi sistem meningkat, maka kualitas output juga meningkat. Indikator yang terakhir adalah pencapaian tujuan secara menyeluruh. Efektivitas secara menyeluruh dapat dilihat dari sejauh mana target dari segi kualitas, kuantitas maupun waktu yang telah dicapai oleh organisasi.

Laporan keuangan pemerintah daerah

Output dari akuntansi sektor publik adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UU No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan yang menyajikan kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban yang dapat dipenuhi oleh pemerintah. Laporan keuangan merupakan hasil tanggung jawab pembuat laporan keuangan. Komponen laporan

keuangan pemerintah daerah terdiri tujuh pokok antara lain, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). UU No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah harus memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Slamet & Irmadiani (2022) dan Rohma (2019) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas dalam bentuk informasi keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan output dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang terukur, sehingga menjelaskan tanggung jawab dan kinerja pengelolaan keuangan anggaran selama periode tertentu (Mene et al., 2018). Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang ditujukan untuk pemangku kepentingan sebagai pengambilan keputusan (Silfiani dan Purnomowati, 2021). Setiap sektor pemerintahan harus memenuhi laporan keuangan yang berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya (Puspasari dan Purnama, 2018). UU No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa kualitas keuangan pemerintah dapat terwujud jika laporan tersebut (1) handal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan tanpa membuat perbandingan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, atau menghubungkan variabel lainnya (Rohma et al., 2023; Rohma & Novitasari, 2022). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai implementasi *software e-accounting*, dan efektivitas pelaporan keuangan saat menerapkan *E-accounting* pada BPKAD Kota Surabaya.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau lembaga tertentu langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati, dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti atau lembaga untuk memecahkan masalah yang akan dicari jawabannya (Agung & Yuesti, 2019:63; Rohma & Prasiwi, 2022; Rohma & Febriyanti, 2022; Rohma & Syahputra, 2022). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara langsung dengan pihak pertama yaitu Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Staff Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Akuntansi karena berhubungan langsung dan mengawasi seluruh aktivitas pelaporan keuangan di BPKAD Kota Surabaya. Selain itu, Staff Bidang Akuntansi sebagai informan karena berhubungan langsung dengan kegiatan utama dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Klasifikasi informan pada penelitian ini dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Informan

Informan	Posisi
Agung Prambudi, S.E.	Kepala Sub Bidang Akuntansi
Desti Ningsih, A.Md.	Staff Bidang Akuntansi

Sumber: Data diolah, 2023

Data sekunder menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu dan tidak secara langsung (Agung & Yuesti, 2019:63). Data sekunder dari penelitian ini adalah profil perusahaan, visi dan misi organisasi situs penelitian BPKAD Surabaya. Data juga diperoleh dari berbagai sumber dan literatur seperti artikel, buku, jurnal, dan website internet tentang implementasi dan efektivitas teknologi informasi berbasis akuntansi serta semua yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan berupa pencatatan peristiwa, deskripsi, dan karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian (Agung & Yuesti, 2019:63). Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu observasi, eksplorasi terfokus, pengumpulan data, dan konfirmasi data. Observasi dilakukan pada Sub Bidang Akuntansi di BPKAD Kota Surabaya dikarenakan kelengkapan data penelitian. Eksplorasi terfokus menentukan objek untuk sasaran utama penelitian. Objek penelitian ini adalah *E-accounting*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik semiterstruktur. Penggunaan wawancara dengan teknik semiterstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Peneliti mewawancarai Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Staff Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di kota Surabaya.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelusuri informasi melalui dokumen. Agung & Yuesti (2019:) menjelaskan bahwa dokumen dapat berupa surat, laporan, buku harian, hasil rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya. Konfirmasi data dilakukan untuk menguji kebenaran data yang telah dilakukan. Uji validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses memeriksa data dari berbagai sumber dalam berbagai waktu dan cara. Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, *display*/penyajian data, dan kesimpulan/*verifikasi*. Reduksi data adalah kegiatan meringkas data yang diperoleh. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas, menggunakan tabel dan sebagainya. Hasil observasi dan wawancara disajikan ke dalam kalimat-kalimat sehingga dapat menggambarkan bagaimana implementasi *E-accounting* dan efektivitas pelaporan keuangan saat menggunakan *E-accounting*. Sedangkan kesimpulan merupakan langkah yang dilakukan setelah tahap reduksi dan penyajian data. Kesimpulan menjelaskan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan setelah melakukan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Accounting pada BPKAD Kota Surabaya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya telah menggunakan *E-accounting* sejak tahun 2015. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah serta Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sebelumnya, BPKAD Kota Surabaya menggunakan aplikasi SAPA yaitu Sistem Administrasi Penatausahaan Anggaran dalam proses akuntansinya. *E-accounting* diberlakukan karena sistem penyusunan laporan keuangan pada tahun 2015 menggunakan dua basis yaitu basis kas dan akrual. Pada aplikasi SAPA hanya bisa diterapkan untuk penyusunan laporan dengan basis kas. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya membuat aplikasi keuangan, yaitu *E-accounting* yang pelaporannya bisa mencakup basis akrual. BPKAD Kota Surabaya telah mengimplementasikan *E-accounting* dalam kegiatan operasional sehari-hari. Aplikasi *E-accounting* yang digunakan adalah versi *website* atau *online* yang bisa diakses pada laman eaccounting.surabaya.go.id. Dengan menggunakan *website E-accounting*, permasalahan seperti *error* dan kegagalan update dapat diatasi karena unit kerja tidak perlu melakukan pembaruan versi aplikasi secara manual. Perbaikan atau pemeliharaan aplikasi dilakukan oleh tim pusat IT di BPKAD Kota Surabaya dan akan *ter-update* secara otomatis ke *website*.

Website E-accounting yang diimplementasikan BPKAD Kota Surabaya, di program untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Format

laporan keuangan disusun secara sistematis berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) sesuai yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Website E-accounting* diimplementasikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini sebagai mana disampaikan informan bahwa:

“E-accounting ini digunakan oleh seluruh OPD baik dinas dan kecamatan. Pada BPKAD ini digunakan oleh penyelia akuntansi untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). jadi setiap OPD mempunyai login dan passwordnya sendiri. Biasanya yang bisa mengakses yaitu bendahara, BPK, dan Pencatat Penatausahaan Keuangan yang membuat pembukuan di dinas tersebut. Pada BPKAD di bidang anggaran dan akuntansi, yang bisa memakai adalah penyelia. Penyelia memiliki tugas menyocokkan data yang di input setiap OPD sudah benar atau belum. Selain penyelia, kepala bidang dan kepala bagian BPKAD membutuhkan login e-accounting untuk melaporkan laporan kepada pemimpin”.

Dalam *website E-accounting* terdapat empat belas (14) menu yang tersedia untuk penyusunan laporan keuangan. Semua menu digunakan oleh BPKAD Kota Surabaya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Perbandingan penggunaan menu yang terdapat dalam aplikasi SAPA dan *E-accounting* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Penggunaan Menu dalam Aplikasi SAPA dan Website E-accounting

No.	Menu-Menu pada Aplikasi SAPA	Menu-Menu pada Website E-Accounting
1.	File	Kamus
2.	Jurnal	Berita Acara
3.	Laporan	Jurnal
4.	Laporan (Pengecekan)	Jurnal BLUD
5.	Laporan Prognosis	Jurnal BOS / Kapitasi
6.		Jurnal PPKD
7.		SP2B
8.		SP3B
9.		Laporan Jurnal
10.		Laporan Saldo Awal
11.		Laporan Kontrol
12.		Laporan Keuangan
13.		Kontrol Pemkot
14.		Laporan Keu Pemkot

Sumber: Data diolah dari implementasi *E-accounting* pada BPKAD Kota Surabaya, 2023

Pengimplementasian menu-menu *E-accounting* di BPKAD Kota Surabaya sudah tidak bercampur dengan penggunaan aplikasi SAPA. Namun, bidang akuntansi pada BPKAD masih menggunakan aplikasi SAPA. Salah satunya aplikasi SAPA masih digunakan dalam menginput jurnal umum pemindahbukuan (*overbooking*) rekening potongan pada SP2D dan STS OPD. Dalam pelaksanaannya, menu-menu pada *website E-accounting* digunakan berdasarkan tugas dan fungsinya. Setiap bidang pada BPKAD Kota Surabaya memiliki aplikasi sendiri, seperti pada anggaran menggunakan *E-budgeting*, untuk penatausahaan menerapkan *E-payment*, dan bidang akuntansi menggunakan *E-accounting*. *Website E-accounting* telah terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Semua data baik dari anggaran dan penatausahaan akan muncul dalam *E-accounting* dan dipergunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil tinjauan atas implementasi menu-menu *E-accounting* pada BPKAD Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa semua menu yang digunakan oleh Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kota Surabaya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah harus memuat segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah. PP No 56 tahun 2005 dan PMK No 74 Tahun 2020 juga menjelaskan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah

sistem yang bisa mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data keuangan serta data informasi lain sebagai bahan pengambilan keputusan. *Website E-accounting* mampu menyimpan dan mengelola data keuangan semua SKPD maupun BLUD. Semua data telah tersedia dan tercover dalam menu-menu yang tersedia dalam *E-accounting*. Hal ini sesuai sebagai mana disampaikan informan bahwa:

“ jadi menu-menu di *E-accounting* dipergunakan semua karena sesuai kebutuhan, kita diminta minimal membuat 7 laporan keuangan yang harus diserahkan untuk di audit oleh BPK. Setiap ada transaksi harus dijurnal harian supaya jika dibuthkan laporan sewaktu-waktu seperti realisasi tahun ini sudah berapa, penerapan belanja berapa, pendapatan sampai dengan hari ini berapa karena semua transaksksi di entry dalam *E-accounting* maka otomatis dapat terlihat laporannya. Terkait dengan prosedur, biasanya kita ada juknis (petunjuk teknis) jadi misal kita entry jurnal LRA, kita bisa tau menunya dimana dan melihat laporan dimana.”

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *E-accounting* telah terlaksana sesuai dengan prosedur dan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan. Temuan ini selaras dengan beberapa penilitan yang menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Hasanah et al., 2021; Silfiani dan Purnomowati, 2021; Puspasari dan Purnama, 2018; Mene et al., 2018; Ternalemta et al., 2021; Akhmad, 2018; Mutiana et al., 2017; Yuliani dan Agustini, 2016; Widarsono dan Lediana, 2013). Lebih dari itu, penggunaan sistem digitalisasi juga dapat mendorong program ekonomi hijau (Rohma, 2023). Pernyataan informan menjelaskan bahwa implementasi teknologi informasi yang telah terlaksana sesuai dengan prosedur akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana proses penyusunan laporan keuangan dengan teknologi informasi akan tersusun secara otomatis dalam komputer yang memiliki kemampuan lebih cepat dan akurat dibandingkan secara manual. Selain itu, dengan adanya pedoman atau petunjuk teknis dalam pengoperasian *E-accounting* dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam implementasinya, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menu-menu dalam *website E-accounting* diimplementasikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Akuntansi BPKAD Kota Surabaya telah memahami teknis penggunaan dan pemanfaatan menu-menu *E-accounting*. Adapun rekapitulasi penggunaan menu pada *website E-accounting* di BPKAD Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Penggunaan Fungsi Pada Menu Website E-Accounting

No.	Deskripsi	Status
1.	Kamus	Dapat diimplementasikan dengan baik
2.	Berita Acara	Dapat diimplementasikan dengan baik
3.	Jurnal	Dapat diimplementasikan dengan baik
4.	Jurnal BLUD	Dapat diimplementasikan dengan baik
5.	Jurnal BOS / Kapitasi	Dapat diimplementasikan dengan baik
6.	Jurnal PPKD	Dapat diimplementasikan dengan baik
7.	SP2B	Dapat diimplementasikan dengan baik
8.	SP3B	Dapat diimplementasikan dengan baik
9.	Laporan Jurnal	Dapat diimplementasikan dengan baik
10.	Laporan Saldo Awal	Dapat diimplementasikan dengan baik
11.	Laporan Kontrol	Dapat diimplementasikan dengan baik
12.	Laporan Keuangan	Dapat diimplementasikan dengan baik
13.	Kontrol Pemkot	Dapat diimplementasikan dengan baik
14.	Laporan Keu Pemkot	Dapat diimplementasikan dengan baik

Sumber: Data diolah dari implementasi *E-accounting* pada BPKAD Kota Surabaya, 2023

Efektivitas Pelaporan Keuangan BPKAD Kota Surabaya Menggunakan *E-Accounting*

Mengutip teori efektivitas program menurut Campbell dalam (Mamonto et al., 2022), efektivitas penerapan *e-accounting* dalam pelaporan keuangan pada BPKAD Kota Surabaya ditinjau dari aspek keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang telah di ditetapkan sebelumnya (Mamonto et al., 2022). Efektivitas Keberhasilan program dapat ditinjau dari kualitas program yang dijalankan. Berdasarkan hasil temuan terkait penerapan *E-accounting*, didapatkan bahwa *software E-accounting* sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan prosedur dan tujuan penerapan *E-accounting* di BPKAD Kota Surabaya. Hal ini terkonfirmasi dari salah satu informan bahwa:

“laporan keuangan yang kita hasilkan sudah benar berdasarkan SAP dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Kalau kita tidak memakai aplikasi, kita akan tidak efektif dan efisien, karena jika manual maka ada beribu-ribu jurnal yang akan ditulis dan dicetak, apalagi ada banyak OPD”

Laporan keuangan yang dihasilkan BPKAD Surabaya dengan menggunakan *software E-accounting* sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Data dan informasi yang dihasilkan dari *software E-accounting* dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan.

Penerapan *software E-accounting* juga digunakan oleh semua OPD Kota Surabaya. Dalam proses pelaksanaannya, *software E-accounting* tidak mudah digunakan oleh pegawai dalam pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua pegawai berlatar belakang akuntansi. Puspasari dan Purnama (2018) menjelaskan bahwa teknologi informasi menentukan keberhasilan suatu sistem informasi, ketidakpahaman pengguna tentang sistem akan menyebabkan kegagalan internal dalam menggunakan teknologi informasi. Untuk mengoptimalkan penerapan *software E-accounting*, pihak Sub Bidang Akuntansi BPKAD selaku penyelia melakukan pendampingan pada setiap OPD dan beberapa kali diadakan pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan oleh BPKAD SDM. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *software E-accounting* sudah berhasil diterapkan di BPKAD Kota Surabaya secara efektif dan efisien. Namun terdapat beberapa PPK dalam OPD yang tidak bisa menggunakan *software E-accounting*. Untuk mengatasi hal tersebut, BPKAD Kota Surabaya melakukan asistensi dan pelatihan.

Keberhasilan Sasaran

Hasil temuan terkait keberhasilan sasaran dari penerapan *E-accounting*, diperoleh bahwa implementasi *software E-accounting* sangat membantu BPKAD Kota Surabaya dalam mencapai targetnya yaitu menghasilkan laporan keuangan dengan tepat, cepat, dan akurat. Hal ini terkonfirmasi dari salah satu informan bahwa:

“selama kita memakai E-accounting, Pemkot Surabaya selama sepuluh tahun berturut-turut selalu mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”

Keberhasilan sasaran ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Campbell (dalam Mamonto et al., 2022) bahwa keberhasilan sasaran memfokuskan pada aspek output, artinya keefektifan dapat diukur dari seberapa jauh output telah sesuai dengan prosedur kebijakan yang telah ditetapkan. Penerapan *E-accounting* dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan menggunakan *software E-accounting* dapat meminimalisir kesalahan dan mengefisiensi waktu karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu, dengan adanya *software e-accounting* semua data keuangan dapat disimpan dengan aman dalam sistem komputer.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi *software e-accounting* membantu BPKAD Kota Surabaya khususnya Bidang Akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat, dan akurat dibuktikan dengan perolehan opini WTP yang berturut-turut. Dengan adanya *software e-accounting* mempermudah proses pemeriksaan

dan penjurnalan masing-masing OPD karena seluruh data akan terangkum ke *e-accounting* dan dapat diakses kapan saja.

Kepuasan Terhadap Program

Indikator kepuasan terhadap program menurut Campbell (dalam Mamonto et al., 2022) kepuasan adalah ukuran efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna, artinya kepuasan pengguna dapat dikatakan efektif apabila kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna dapat tercapai dengan baik. Hal ini sesuai sebagaimana yang disampaikan informan bahwa:

“sejauh ini tidak ada complain terkait E-accounting karena pengoperasiannya yang user friendly, relative mudah karena menu-menumnya juga jelas. Kalau mereka kurang faham juga ada penyelia yang mendampingi”

Berdasarkan hasil temuan terkait kepuasan program terhadap *E-accounting*, didapatkan bahwa menu-menu yang ada di *software E-accounting* mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Semua menu dan fitur dalam *software E-accounting* diimplementasikan sesuai tugas dan fungsinya oleh BPKAD Kota Surabaya. Untuk dapat mengakses *software E-accounting* diperlukan *password* dan *username* masing masing penyelia atau OPD sehingga tidak semua orang bisa login pada *E-accounting*. Oleh karena itu, data yang diinput dalam *software E-accounting* akan aman karena tersimpan dalam computer dan memerlukan akses untuk masuk.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan, kepuasan pengguna terhadap *E-accounting* sudah bisa dikatakan cukup efektif karena seluruh menu-menu pada *software e-accounting* telah terstruktur dengan dengan baik dan data tersimpan dengan aman. Namun, salah satu informan merasa belum puas karena sifat *software E-accounting* yang *continuous improvement* yaitu mengembangkan program secara berkelanjutan. Informan merasa bahwa *software e-accounting* perlu dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan peraturan atau standar yang baru.

Tingkat Input dan Output

Indikator tingkat input dan output menurut Campbell (dalam Mamonto et al., 2022) dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efektif, sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dikatakan tidak efisien. Berdasarkan hasil temuan terkait input dan output dalam *software E-accounting*, didapatkan bahwa semua data yang digunakan untuk menjurnal akan terintegrasi dan terangkum dalam *software e-accounting*. Hal ini sesuai sebagai mana disampaikan informan bahwa:

“kalau input data dasar jurnalnya adalah SP2D untuk pencatatan belanja, STS untuk pencatatan pendapatan, SP2B untuk BLUD seperti puskesmas dan rumah sakit. Itu semua nanti akan masuk di E-accounting. Untuk outputnya mencakup tujuh laporan keuangan dan semuanya juga ada dalam E-accounting.”

Software E-accounting memuat semua data dan informasi yang telah terintegrasi dan terstruktur dengan baik di dalam menu-menu *e-accounting*. Output *software e-accounting* terdiri dari tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan, tingkat input dan output dalam *software E-accounting* dikatakan efektif karena semua data input dan output telah terstruktur dengan baik. Menu yang berisi input yaitu *entry* jurnal atau data-data telah terpisah dengan menu output yang berisi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Data (input) yang benar akan menghasilkan laporan keuangan (output) yang sesuai.

Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Hasil temuan terkait pencapaian tujuan menyeluruh dari penerapan *E-accounting*, didapati bahwa implementasi *software E-accounting* sangat membantu BPKAD Kota Surabaya dalam mencapai tujuannya yaitu penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Campbell (dalam Mamonto et al., 2022) bahwa

pencapaian tujuan menyeluruh dapat dilihat dari sejauh mana kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini juga terkonfirmasi dari salah satu informan bahwa:

“kita selalu ada deadline terkait penyerahan laporan. Di peraturan kita harus menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk laporan konsolidasi. Untuk laporan keuangan OPD dua bulan setelah tahun anggaran berakhir harus diserahkan ke BPKAD selaku PPKD. Selama ini deadline-nya tidak pernah terlewat dan semuanya tepat waktu selama menggunakan E-accounting”

Penggunaan *software E-accounting* dirasa efektif dan efisien karena memudahkan pihak BPKAD Kota Surabaya dalam menyusun laporan keuangan secara cepat, teliti, dan lebih akurat karena terintegrasi dengan sistem. Pengguna dapat mengoperasikan dan mengakses *software E-accounting* dimanapun dan kapanpun untuk mengelola keuangan. Semenjak diberlakukannya *software E-accounting*, laporan keuangan sudah terlaksana secara menyeluruh dan tepat waktu. Keberhasilan ini dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa *software E-accounting* memberikan dampak positif kepada penggunanya khususnya bagi BPKAD Kota Surabaya. Semua data dan informasi telah tersedia dalam menu-menu yang sudah terstruktur dalam *software E-accounting*. Tentu hal ini sangat membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan dengan efektif dan efisien. Semua laporan keuangan yang dihasilkan pada *software E-accounting* dapat dipertanggungjawabkan oleh BPK. *Software E-accounting* memudahkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dengan tepat waktu dan sesuai standar peraturan yang berlaku. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator pencapaian tujuan menyeluruh sudah bisa terpenuhi karena membrikan dampak positif kepada BPKAD Kota Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *E-accounting* dan efektivitas pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *software E-accounting* di BPKAD Kota Surabaya bisa dikatakan diimplementasikan dengan baik karena menu-menu yang ada didalamnya digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pengguna, khususnya dalam Sub Bidang Akuntansi mampu mengoperasikan dengan tepat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Penggunaan *software E-accounting* bisa dikatakan efektif terhadap pelaporan keuangan karena dapat membantu BPKAD Kota Surabaya dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan akurat. Penggunaan *software E-accounting* dirasa efektif dan efisien karena memudahkan pihak BPKAD Kota Surabaya dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara cepat, teliti, dan lebih akurat karena terintegrasi dengan sistem. Pelaksanaan pelaporan keuangan telah terlaksana secara menyeluruh dan tepat waktu. Laporan keuangan yang dihasilkan dengan menggunakan *software E-accounting* telah sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Software E-accounting memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa harus menginstal dan memperbarui fitur. Menu dan fitur yang tersedia dalam *Software E-accounting* telah terstruktur sesuai dengan tugas dan fungsinya secara jelas. Selain itu, semua data dan informasi laporan keuangan akan terjamin keamanannya karena terlindungi oleh halaman login yang berisi *username dan password*. Namun, selain kelebihan *Software E-accounting* juga memiliki beberapa kekurangan dalam pengoperasiannya. *Software E-accounting* bergantung pada server internet sehingga membutuhkan jaringan internet yang memadai. Jika terjadi internet *down* atau *server error*, maka akan mengganggu proses berjalannya *entry data*. Bahkan jurnal yang diinput saat internet *down* atau saat *server error* memungkinkan data jurnal tidak tersimpan dalam *Software E-accounting*. Selain itu, *E-accounting* sulit diakses oleh dua komputer (*double login*) dalam waktu bersamaan dalam satu akun. Jika diperlukan dua *login*,

maka salah satu penyelia *login* menggunakan *username* dan *password* OPD, serta yang lain menggunakan *username* dan *password* penyelia sendiri.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran untuk memaksimalkan penerapan *software E-accounting* di BPKAD Kota Surabaya antara lain, perlu adanya program-program pelatihan *software E-accounting* secara berkala untuk pegawai khususnya di Sub Bidang Akuntansi serta PPK setiap OPD. Survei kepuasan pengguna *software E-accounting* perlu dilakukan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan sistem. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung efektifitas penggunaan *software E-accounting*. Perlu adanya ketegasan dari pimpinan agar karyawan mengoperasikan *software E-accounting* dengan baik dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Keterbatasan penelitian ini yaitu terbatasnya informasi mengenai *software E-accounting* karena hanya diimplementasikan oleh BPKAD Kota Surabaya. Terbatasnya informasi mengenai jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penerapan *software E-accounting* menjadi penghambat penulis dalam memberikan informasi secara detail. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yaitu belum mengetahui secara signifikan pengaruh implementasi dan efektivitas *software E-accounting* terhadap pelaporan keuangan di BPKAD Kota Surabaya. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dan hubungan antara implementasi dan efektivitas *software E-accounting* terhadap pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan seperti akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A.A.P., & Yuesti, A. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bali: CV. Noah Alatheia, *Edisi Ke-1* (Vol. 1).
- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Enrekang*, 7(1) 89–102.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.
- Hasanah, N., & Sriyani, S. (2021). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di Masa Pandemi Covid-19 pada KPPN Palembang. *Journal Publicuho*, 4(3), 886–912.
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 133–143.
- Mamonto, S.I.P., Rachman, I., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Kinalang sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Kota Kotamobagu. *JURNAL GOVERNANCE*, 2(1).
- Muharsono, & Asfiyah, L. (2021). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa i Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 14(2), 328–338.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida, Z. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern,

- Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 151–167.
- Parsaorantua, P. humisar, Pasoreh, Y., & Rondonuwu, sintje A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Acta Diurna*, VI(3), 1–14.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 1–445.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 3, 1–8.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 14, 1–20.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (*SAP*).
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145.
- Rahardja, U., Aini, Q., & Hardini, M. (2018). Penerapan Software Akuntansi Online sebagai Penunjang Pencatatan Laporan Keuangan. *Sisfotenika*, 8(2), 176.
- Rosyidah, U. F., Zuniatin, H., & Rohma, F. F. (2023). Upaya Sinkronisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Program Magang Industri Guna Mendorong Efisiensi Kinerja. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 36-41.
- Rohma, F. F. (2023). Does a green economy mentality exist? An experimental study in emerging country. *Asian Journal of Business Ethics*, 1-20.
- Rohma, F. F. (2023). Efektivitas Informasi dan Komunikasi dalam Memitigasi Tendensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-13.
- Rohma, F. F. (2023). Substitusi Silang Anggaran: Pola Mekanisme Penganggaran Pada Organisasi Intrakampus. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(2), 80-87.
- Rohma, F. F., & Febrianti, A. V. (2022). The Implementation of Differential Analysis in Ultra-Micro Manufacturing Business. *Best Journal of Administration and Management*, 1(2), 75-79.
- Rohma, F. F., & Novitasari, I. (2022). Portrait of Performance Measurements: A Case Study in Micro Organization. *Journal of Economics, Management, and Business Research*, 3(2).
- Rohma, F. F., & Prasiwi. E. A. N. (2022). The analysis of process costing method: a case study in ultra micro business. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 10(02), 64-75.
- Rohma, F. F., & Syahputra, B. E. (2022). The Investment Urgency In Ultra Micro Organizational Going Concern. *Journal of Multidisciplinary Science*, 1(3), 139-145.
- Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(1), 62-80.
- Rohma, F. F., Surur, S. N., Kusumawati, S. A. A., & Anandita, A. (2023). Meneropong Aspek Motivasi Pola Kecurangan Akademik. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1).
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R.D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2); 179-191.
- Silfiani, S., & Purnomowati, N.H. (2021). Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) pada Pemerintah Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 228.
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Bogor). *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 67-80.
- Sukmana, S. R. (2021). *Efektivitas Pelaporan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. Skripsi: Universitas Galuh.
- Ternalemta., Kalangi, L., & Tinangon, J.J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2): 264–275.
- Wati, M. S. W., & Adiputra, I. M. P. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Lamikro pada Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3):704–716.
- Widarsono, A. & Ledian, N.Y. (2013). Pengaruh Efektivitas Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1-7.
- Yuliani, N.L., & Agustini, R.D. (2016). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, 14(1): 56-64.



Hak Kopy (*copy right*) atas Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi ada pada penerbit dengan demikian isinya tidak diperkenankan untuk dikopy atau di-*email* secara masal atau dipasang diberbagai situs tanpa ijin tertulis dari penerbit. Namun demikian dokumen ini dapat diprint diunduh, atau di-*email* untuk kepentingan atau secara individual.
